



---

**Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019**

**Adam Wahyu Setiawan<sup>1\*</sup>, M.B Nani Ariani<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta<sup>1,2</sup>

Email: adamwahyusetiawan123@gmail.com<sup>1</sup>, nani.ariani@upnvj.ac.id<sup>2</sup>

---

**Artikel info**

**Artikel history:**

Diterima 01-01-2022

Diterima dalam bentuk  
revisi 14-12-2022

Disetujui : 20-1-2022

**Kata Kunci:** indeks pembangunan manusia; kemiskinan; pengeluaran pemerintah sektor pendidikan; pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

**Keywords:** human development index; poverty; government spending on education sector; health sector spending

---

**Abstrak**

Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah sangat membantu menunjangnya pembangunan secara nasional, seperti pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, kesehatan dan standar hidup untuk semua negara. penelitian ini ialah data sekunder, yang mana data dikumpulkan oleh orang lain dari sampel pada jangka tertentu. tidak semua daerah memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang merata. Hal ini diduga disebabkan karena adanya kesenjangan pengeluaran pemerintah dan kemiskinan, oleh sebab itu dalam penelitian ini membahas faktor-faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia yang ditentukan oleh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, adapun hasilnya menunjukkan bahwa Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan daerah terbukti berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena Kemiskinan merupakan salah satu faktor penentu yang berperan besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia, juga Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan yang juga menjadi salah satu faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan yang terbukti tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia rendahnya dukungan sumber pendanaan yang terbatas. Sumber dana yang terbatas tersebut menyebabkan relatif rendahnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan untuk membiayai sektor publik.

**Abstract**

*The Human Development Index of a region is very helpful in supporting national development, such as a comparative measurement of life expectancy, education, health, and living standards for all countries. This research is secondary data, which is data collected by other people from the sample in a certain period. not all regions have an even Human Development Index. This is thought to be due to the gap between government spending and poverty, therefore in this study discusses the determinants of the Human Development Index determined by Poverty, Government Expenditures in the Education Sector, Government Expenditures in the Health Sector, while the results show that Poverty and Government Expenditure in the Sector Regional health is proven to affect the Human Development Index because Poverty is one of the determining factors that play a major role in the Human Development Index, as well as Government Expenditure on the Health Sector which is also one of the determining factors for the Human Development Index. Furthermore, the Government Expenditure on the Education Sector which is proven to not affect the Human Development Index is low in the support of limited funding sources. These limited sources of funds have resulted in relatively low government spending in the education sector to finance the public sector.*



---

## Pendahuluan

Menurut ([Mahrany](#), 2012) Indeks Pembangunan Manusia ialah faktor vital keberhasilan pengupayaan peningkatan kualitas hidup manusia, dengan adanya pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan angka pemenuhan kebutuhan primer masyarakat sektor kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Pemenuhan kebutuhan primer masyarakat terutama kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi adalah dasar bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat (*welfare*) dan pembangunan manusia (*human development*), menurut teori lingkaran setan kemiskinan menurut Nurkse yaitu adanya keterbelakangan serta rendahnya pengeluaran pemerintah atau ketersediaan modal maka akan berpengaruh kepada rendahnya produktifitas sumber daya manusia menurut didukung pula oleh teori Paul Romer dan Robert Lucas bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu cara dimana manusia dapat mengembangkan sumber daya manusianya karena sumber daya manusia berhubungan positif terhadap IPM. Lanjutnya, kemiskinan berkaitan dengan kesejahteraan, dikarenakan kesehatan dan pendidikan ialah indikator vital kesejahteraan masyarakat yang ingin diraih pemerintah ([Indah](#), 2019).

Menurut ([Keuangan](#), 2020) IPM Provinsi Jawa Barat 2015 – 2019 secara umum terus bergerak positif selama periode 2015-2019. IPM di Provinsi Jawa Barat rata-rata tumbuh tinggi yaitu 0,95% pertahun sedangkan tahun 2015 kebawah hanya berstatus sedang. Meningkatnya IPM tidak terlepas dari peningkatan pada semua komponen pembentuk IPM, komponen tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi Kenaikan IPM pada 2019 ialah hasil agregasi dari kenaikan faktor terbentuknya IPM ([FEBRIANY](#), 2021). Secara persentase, kenaikan pada 2019 adalah yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. IPM Jawa Barat sempat menyentuh di atas 1% pada 2015, namun setelah itu persentase pertumbuhan IPM cenderung di bawa 1%, sedangkan pada tahun 2020 tidak di gunakan karena terjadinya pandemi di seluruh dunia terutama di Indonesia yang sangat mempengaruhi hampir ke segala sektor kehidupan, dan berpengaruh pula terhadap peningkatan IPM hasil kenaikan tersebut sangat tipis dan belum terbias dikarenakan pada tahun terakhir, IPM umumnya naik 0,5-0,6, namun tahun 2020 hal tersebut belum terjadi sebab IPM hampir konstan. Lambatnya pergerakan IPM saat 2020 sangat terpengaruh oleh menuurannya rerata pengeluaran perkapita ([Khadijah](#), 2020).

Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan yaitu SDA yang banyak pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan tetapi pada masalah pembangunan manusianya seperti perbedaan kualitas sumber daya manusia yang dimaksud yaitu tingkat pendidikan masyarakat Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, Purwakarta, Subang, Majalengka, Kuningan dan beberapa daerah yang berbeda, penduduk dengan pendidikan terakhir SMA atau kurang, sebagian penduduk hanya memiliki pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama atau dasar dan perbedaan tingkat kesejahteraan yang dimaksud adalah taraf dan tingkat kesehatan, beberapa daerah di Jawa Barat mempunyai angka mortalitas bayi yang

tinggi yaitu Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, dan Majalengka, dikarenakan oleh kesejahteraan umum di Provinsi Jawa Barat yang masih buruk, maka dengan investasi pengeluaran pemerintah baik berupa pendidikan maupun kesehatan yang berdampak kepada kemampuan wilayah guna menjalankan pembangunan manusia. Modal ini sangat dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kondisi daerahnya misal memperbaiki SDM, meningkatkan sarana umum dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah juga bisa dijadikan penggerak untuk perekonomian daerah, maka sebab itu perbedaan total pengeluaran pemerintah dapat juga mengakibatkan perbedaan kinerja ekonomi daerah Provinsi Jawa Barat. Tingkat IPM yang tinggi nyatanya tidak menjadi jaminan naiknya kehidupan sebagian penduduk ([Sartika & Suryani, 2021](#)).

### Metode Penelitian

Data penelitian ini ialah data sekunder, yang mana data dikumpulkan oleh orang lain dari sampel pada jangka tertentu. Data tersebut menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari time series dan cross-section. Semua data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, menggunakan data digital yaitu menggunakan data IPM, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2015-2019.

Terdapat beberapa sumber data pada penelitian, diantaranya adalah data IPM dan Tingkat Kemiskinan didapatkan dari Badan Pusat Statistik, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan. Populasi yang digunakan pada penelitian yaitu IPM, Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh, ialah pengambilan sampel dimana seluruh bagian populasi digunakan menjadi sampel. Jumlah sampel penelitian yaitu 135 sampel dimana Jawa Barat memiliki 18 wilayah administrasi dan 9 kota, kemudian dikalikan 5 tahun, karena menggunakan periode 2015-2019.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Uji Asumsi Klasik

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

<i>Jarque-Bera</i>	0.563600
<i>Probability</i>	0.754425

Berdasarkan tabel 1, Nilai probabilitas  $JB > 0.05$  maka ini terdistribusi normal, begitu pula sebaliknya. Seperti terlihat dari pengujian, nilai hitung dari nilai probabilitas JB adalah  $0.563600 > 0.05$ , maka residual terdistribusi dengan normal, berarti asumsi klasik tentang normalitas tidak terdapat masalah normalitas.

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolenaritas**

	Pdm	Pengdik	Pengkes
Pdm	1.000000	-0.004738	-0.018244
Pengdik	-0.004738	1.000000	0.072652

Pengkes	-0.018244	0.072652	1.000000
---------	-----------	----------	----------

Sumber : Hasil Olah Data *Eviews* 10

Berdasarkan tabel 2, Pengujian diatas, dapat terlihat nilai VIF antar variabel terletak di bawah 10, yang dimana nilai paling tinggi sebesar 0. 072652 dan terendah sebesar - 0.018244, yang artinya bahwa tidak ada masalah multikolinearitas.

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi**

<i>R-squared</i>	0.995906	<i>Mean dependent var</i>	7034.800
<i>Adjusted R-squared</i>	0.994776	<i>S.D. dependent var</i>	491.2542
<i>S.E. of regression</i>	35.50736	<i>Akaike info criterion</i>	10.17049
<i>Sum squared resid</i>	132381.1	<i>Schwarz criterion</i>	10.81610
<i>Log-likelihood</i>	-656.5079	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	10.43285
<i>F-statistic</i>	880.8483	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.476723
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber : Hasil Olah Data *Eviews* 10

Berdasarkan tabel 3, Pengujian diatas, dapat terlihat nilai DW sebesar 1.476723 yang menunjukkan bahwa nilai DW < 2 (1.476723<2), maka tidak ada masalah autokorelasi.

**Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas**

<i>Dependent Variable: RESABS</i>	
<i>Method: Panel Least Squares</i>	
<i>Variable</i>	<i>Prob.</i>
C	0.6620
PDM	0.0796
PENGDIK	0.5911
PENGGES	0.4162

Sumber : Hasil Olah Data *Eviews* 10

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai *p-value* variable PDM yaitu 0.0796, menunjukkan nilai *p-value* > tingkat alpha 0.05, sehingga kemiskinan terbebas dari masalah heterokedastisitas.
- 2) Nilai *p-value* variable PENGDIK yaitu 0.5911, menunjukkan nilai *p-value* > tingkat alpha 0.05, sehingga kemiskinan terbebas dari masalah heterokedastisitas.
- 3) Nilai *p-value* variable PENGGES yaitu 0.4162, menunjukkan nilai *p-value* > tingkat alpha 0.05, sehingga pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terbebas dari masalah heterokedastisitas.

## B. Penentuan Model Regresi

**Tabel 5. Hasil Uji Hausman**

<i>Correlated Random Effects - Hausman Test</i>
<i>Equation: Untitled</i>
<i>Test cross-section random effects</i>

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross section random</i>	14.250061	3	0.0026

Sumber : Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 5 Pengujian diatas, dihasilkan besaran distribusi *chi-square* 14.250061 serta besaran probabilitas *chi-square* 0.0026 yang  $< \alpha = 5\%$  ( $0.0026 < 0.05$ ) maka  $H_0$  ditolak. Artinya, metode estimasi yang baik pada penelitian yaitu *fixed effect model*.

**Tabel 6. Hasil Uji Fixed Effect Model**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	7010.209	402.4461	17.41900	0.0000
PDM	-62.73923	3.789989	-16.55394	0.0000
PENGDIK	0.045858	0.180507	0.254050	0.8000
PENGGES	0.210759	0.035868	5.876001	0.0000

Sumber : Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 6 Pengujian diatas, hasil regresi menghasilkan nilai konstanta pada angka 7010.209 yang menunjukkan jika variabel penduduk miskin, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan serta pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dianggap bernilai konstan maka besaran nilai IPM yaitu 70.10.

Koefisien regresi kemiskinan sebesar -62.73. Artinya setiap kenaikan kemiskinan sebesar satu satuan akan menyebabkan penurunan IPM senilai 62.73 satuan dan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 0.045. Artinya setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar satu satuan akan menyebabkan kenaikan IPM senilai 0.045 satuan dan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 0.210. Artinya setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar satu satuan akan menyebabkan kenaikan IPM senilai 0.210 satuan dan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

### C. Uji Hipotesis

**Tabel 7. Hasil Uji T**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	7010.209	402.4461	17.41900	0.0000
PDM	-62.73923	3.789989	-16.55394	0.0000
PENGDIK	0.045858	0.180507	0.254050	0.8000
PENGGES	0.210759	0.035868	5.876001	0.0000

Sumber : Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 7 Pengujian diatas, Pada penelitian ini, nilai  $df = n - k$  yang dihasilkan sebesar  $df = 135 - 4 = 131$ , dimana  $n$  adalah jumlah observasi dan  $k$  adalah jumlah variabel terikat dan variabel bebas. Dengan nilai  $df = 131$  dan signifikansi 0.05

sehingga didapatkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.65657, maka:

Berdasarkan hasil regresi di atas, kemiskinan mempunyai  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  ( $-16.55 < -1.656$ ). Nilai probabilitas  $0.0000 < \alpha=5\%$  ( $0.0000 < 0.05$ ), maka disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya kemiskinan (PDM) berpengaruh signifikan terhadap IPM, oleh sebab itu  $H_1$  dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil regresi di atas, pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan mempunyai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0.25 < 1.656$ ). Nilai probabilitas  $0.8000 > \alpha=5\%$  ( $0.8000 > 0.05$ ), maka disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima, yang artinya pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan (PENGDIK) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap IPM, oleh sebab itu  $H_2$  dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hasil regresi di atas, pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan mempunyai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5.87 > 1.656$ ). Nilai probabilitas  $0.0000 < \alpha=5\%$  ( $0.0000 < 0.05$ ), maka disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, yang artinya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PENGKES) berpengaruh dan signifikan terhadap IPM, oleh sebab itu  $H_3$  dinyatakan diterima.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

<i>F-statistic</i>	880.8483
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber : Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan tabel 8 Pengujian diatas, Nilai  $f_{hitung}$  hasil regresi senilai 880.84 sedangkan  $f_{tabel}$  senilai 2.67, sehingga diperoleh hasil  $f_{hitung}$  ( $880.84$ )  $>$   $f_{tabel}$  ( $2.67$ ) dan probabilitas senilai  $0.000000 < \alpha = 5\%$  maka secara statistik model regresi yang digunakan telah layak.

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<i>R-squared</i>	0.995906
<i>Adjusted R-squared</i>	0.994776

Sumber : Hasil Olah Data *Eviews 10*

Berdasarkan table 9 Pengujian diatas, Dihasilkan nilai  $R^2$  senilai 0.995906 berarti variabel dependen IPM bisa dijelaskan oleh variabel Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan senilai 99.59% dan sisanya senilai 0.41% dijelaskan oleh variabel lain dari penelitian ini. Serta besaran adjusted  $R^2$  senilai 0.994776 berarti variabel bebas Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan dapat menjelaskan variabel terikat IPM senilai 99.47% dan sisanya senilai 0.53% dipengaruhi oleh variabel yang tidak masuk di penelitian ini.

## Kesimpulan

Kemiskinan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dikarenakan program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan berjalan dengan baik dengan cara kemauan untuk mendirikan negara modern inilah kemudian semakin ditingkatkan untuk kegiatan

pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia, ada kecenderungan untuk kemajuan manusia yang lebih baik dari sudut kesehatan, pengajaran dan keuangan. dengan begitu akan meningkatnya produktifitas guna mengurangi angka kemiskinan di daerah Provinsi Jawa Barat, pada akhirnya semua mengalami pembangunan

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan karena adanya kesenjangan sektor pendidikan terutama dalam minimnya ketersediaan akses pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Barat menyebabkan banyak siswa yang belum bisa menjangkau layanan pendidikan yang dimana kondisi ini akan membuat mereka rentan terhadap persoalan ekonomi dan sosial c. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan karena pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi prioritas oleh Pemerintah terlihat dari besaran anggaran APBDnya. Pemerintah telah mendorong untuk mewajibkan berbagai sektor instansi pemerintah ataupun swasta untuk turut aktif mendukung penyelenggaraan program-program kesehatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

### Bibliografi

- Anny, S., & Euis, S. (2021). Determinasi Faktor – Faktor Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 9, No.1.
- [Bhakti](#), S. M., & Abdul, H. (2013). Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Economia*, Vol 9, No 1. doi [10.21831/economia.v9i1.1373](https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1373)
- Dewi, N. (2017). [Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau](#). *Jom Fekon* , 873.
- Hardoko, E. (2017, September 11). *Dana Jaminan Kesehatan Untuk Warga Kota Bekasi Tersisa Rp 39 Miliar*. From Kompas.Com: <https://Palembang.Kompas.Com/Read/2017/09/11/09194601/Dana-Jaminan-Kesehatan-Untuk-Warga-Kota-Bekasi-Tersisa-Rp-39-Miliar?Page=2>
- Indah, P. (2019). Pengaruh Pdrb, Jumlah Penduduk Miskin, [Apbd Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Agam](#). *Unand*.
- Iwan, D. (2019, Agustus 07). [Minat Baca Buku Warga Kota Banjar, Masih Rendah](#). From Kapol.Co.Id: <https://Kabarpriangan.Com/Minat-Baca-Buku-Warga-Kota-Banjar-Masih-Rendah/>
- Kamil, F. (2018, 10 5). [Kabupaten Tasikmalaya Tak Miliki Regulasi Phbs](#). From News.Koropak.Co.Id: <https://News.Koropak.Co.Id/4692/Kabupaten-Tasikmalaya-Tak-Miliki-Regulasi-Phbs>
- Khadijah, N. (2020, Desember 15). [Indeks Pembangunan Manusia Di Tahun 2020 Naik Tipis, Bps: Ini Dampak Pandemi Covid-19](#). From <https://Www.Pikiran-Rakyat.Com>: <https://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Nasional/Pr-011113332/Indeks-Pembangunan-Manusia-Di-Tahun-2020-Naik-Tipis-Bps-Ini-Dampak-Pandemi-Covid-19>
- Muliza, T. Z. (2017, Oktober 1). [Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipmdi Provinsi Aceh](#). *Pendidikan, Kesehatan, Ipm*, 3. From Layanan Ipm Kota Bandung Tertinggi Di Jawa Barat: <https://Humas.Bandung.Go.Id/Layanan/Ipm-Kota-Bandung-Tertinggi-Di-Jawa-Barat>
- [Nugroho](#), S. (2014). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 29 No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.24856/mem.v29i2.229>
- Nurdiansyah, R. D. (2019, December Jumat). [Angka Kemiskinan Depok Terus Menurun Di](#)



[Setiap Tahunnya](https://Republika.Co.Id/Berita/Q356jc368/Angka-Kemiskinan-Di-Depok-Terus-Menurun-Setiap-Tahun). From Nusantara: [Https://Republika.Co.Id/Berita/Q356jc368/Angka-Kemiskinan-Di-Depok-Terus-Menurun-Setiap-Tahun](https://Republika.Co.Id/Berita/Q356jc368/Angka-Kemiskinan-Di-Depok-Terus-Menurun-Setiap-Tahun)

Widodo, A., Waridin, & Johanna, M. K. (2011). [Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah](#). Semarang: Bpkp Perwakilan Jawa Tengah.

Yohanes, P. D. (2020). [Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur Tahun 2010-2019](#). *Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Yulistyne, K. (2020, Februari 7). *Ipm Jawa Barat Tahun 2019 Mencapai 72,03, Kualitas Hidup Manusianya Terus Bergerak Positif*. [Https://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Ekonomi/Pr-01341130/Ipm-Jawa-Barat-Tahun-2019-Mencapai-7203-Kualitas-Hidup-Manusianya-Terus-Bergerak-Positif](https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01341130/ipm-jawa-barat-tahun-2019-mencapai-7203-kualitas-hidup-manusianya-terus-bergerak-positif)